

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing, maju dan sejahtera. Berbagai macam kegiatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal untuk menyamaratakan pembangunan di berbagai wilayah. Menurut Simatupang dan Dermoredjo (2003), Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama yang membuat pembangunan ini berhasil adalah dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan yang utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakan hasil yang optimal. Masih

terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas.

Faktor penyebab kemiskinan (Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, muncul karena perbedaan akses dalam modal

Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB dari tahun 2009 hingga tahun 2015 mengalami penurunan, yaitu sebesar 22,78% pada

tahun 2009 menjadi 17,1% pada tahun 2015. Berikut adalah tabel jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi NTB.

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2009	1.050.948	22,78
2010	1.009.352	21,55
2011	900.573	19,73
2012	862.516	18,63
2013	843.660	17,97
2014	820.818	17,42
2015	823.886	17,1

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi NTB*

Jumlah dan presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB dari tahun 2009 hingga tahun 2015 mengalami periode yang relatif baik karena mengalami tren yang menurun. Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB mengalami penurunan. Pada periode 2009-2015 terjadi penurunan jumlah sebesar 227.062 penduduk miskin, yaitu dari 1.050.948 penduduk miskin pada tahun 2009 menjadi 823.886 penduduk miskin pada tahun 2015. Secara relatif juga terjadi penurunan presentase penduduk miskin dari 22,78 persen pada tahun 2009 menjadi 17,1 persen pada tahun 2015. Akan tetapi penurunannya belum terlalu besar, hal ini terjadi karena belum adanya kebijakan yang benar-benar membantu dan berpihak kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitasnya agar dapat terhindar dari kemiskinan.

Tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah juga menjadi faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Pendidikan akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk satu-satunya memperoleh pekerjaan, dimana dibutuhkan juga kreatifitas dan daya saing dalam melaksanakan segala rutinitasnya. Pendidikan dapat mengasah kemampuan dan ketrampilan dalam menghadapi masala serta dapat menyelesaikannya dengan tepat

Menurut Todaro dan Smith (2006), Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 1.2
Presentase Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
di Provinsi NTB

Tahun	Persentase
2009	80,18
2010	81,05
2011	83,24
2012	83,68
2013	84,19
2014	86,63
2015	85,66

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi NTB*

Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan dan jelas kebodohan identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Namun ironisnya, pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas (Winardi, 2010).

1. Pertama, kepedulian pemerintah yang dianggap rendah terhadap pendidikan yang harus kalah dari urusan yang lebih strategis yaitu politik. Bahkan, pendidikan dijadikan jargon politik untuk menuju kekuasaan agar bisa menarik simpati di mata masyarakat.
2. Kedua, privatisasi di bidang pendidikan. Dari sini pendidikan semakin mahal yang tidak bisa di jangkau oleh rakyat. Sehingga, rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi dan itu berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia
3. Ketiga, adalah kondisi masyarakat sendiri yang tidak bisa mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi sehingga harapan rakyat akan kehidupannya menjadi rendah.

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir terpenting dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal

menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa.

Tabel 1.3
Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB

Tahun	Persentase
2009	6,25
2010	5,29
2011	5,33
2012	5,26
2013	5,38
2014	5,75
2015	5,69

Sumber : *BPS, NTB Dalam Angka Menurut Tahun*

Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Angka pengangguran terbuka di Provinsi NTB mengalami perubahan yang tidak stabil secara terus menerus pada tiap tahunnya seperti pada tabel yang tampak diatas, tetapi secara keseluruhan dari tahun 2009-2015 mengalami penurunan sebesar 0,56%.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat untuk memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu

masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara-negara berkembang. Tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki hubungan yang saling berkaitan. Bagi para tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja diparuh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintahan dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah kaya.

Masyarakat miskin pada umumnya mengalami permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang dalam mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja wanita seperti buruh migran dan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu

mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin (Arsyad, 1997).

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*World Bank, 2005*). Menurut Bank Dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja dan biasanya mereka yang di kategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka yang tidak memadai. Masalah-masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Berdasarkan beberapa uraian dan data diatas penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk,

Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi NTB
Periode Tahun 2012-2015.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini yang terkait dengan jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran yang digunakan adalah data di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 sampai tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.
2. Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

3. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan di bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam mengambil kebijakan dalam mengurangi kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.
 - b. Bagi peneliti, bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan lebih dalam mengenai kemiskinan.